



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 38A TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR  
23 TAHUN 2013 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013-2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2013 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018, maka program dan kegiatan serta agenda kegiatan Reformasi Birokrasi dalam kerangka waktu perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2013 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); *L*

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); L

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013-2017.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 023) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : *L*

- (1) Bab II Bagian III tentang Program dan kegiatan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2013 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017 yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tabel 24 pada Bab II, Bagian III dari *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2013 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017 yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 DESEMBER 2014

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, L

  
L **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2014

L SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M

  
V **FRANSISIKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 39A TAHUN 2014

**TANGGAL** : 15 DESEMBER 2014

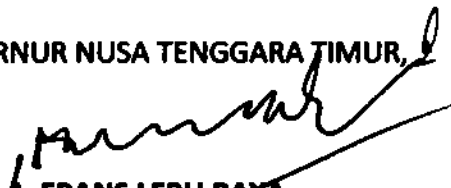
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 23  
TAHUN 2013 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013-2017**

**III. PROGRAM DAN KEGIATAN**

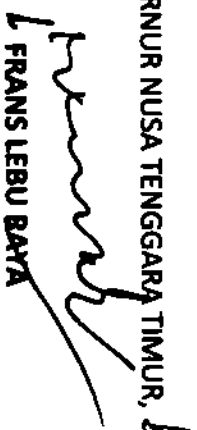
- a) Program Manajemen Perubahan;
- Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara
  - Revisi Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi NTT 2013-2017
  - Fasilitasi, Pembinaan dan Pengendalian implementasi Reformasi Birokrasi
  - Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja (Dalam satu kegiatan yang sama dengan kegiatan No.1 pada Program Penguatan Akuntabilitas)
  - Pengendalian Budaya Kerja
  - Pembinaan Rohani dan Ziarah ke Tanah Suci
  - Natal, Halal bihalal dan syukuran Tahun Baru bagi anggota KORPRI lingkup Pemerintah Provinsi NTT
  - Pekan Olahraga Nasional KORPRI Tahun 2017
  - Pekan Olahraga dan Seni Tk. Provinsi NTT
- b) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- Legislasi Daerah.
  - Rapat Koordinasi Bidang Hukum
  - Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab./Kota
  - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
  - Penanganan Kasus didalam dan luar Pengadilan
  - Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Perundang-Undangan dan Inventarisasi masalah-masalah Hukum
  - Pengembangan JDIH tingkat Provinsi dan Pembinaan JDIH Kab./Kota
  - Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
  - Koordinasi pelaksanaan RANHAM dan perumusan kebijakan Hukum
- c) Program Penataan dan Penguatan Organisasi;
- Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTT
  - Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Provinsi NTT

- **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Bidang Organisasi**
  - **Rapat Koordinasi Bidang Organisasi**
  - **Penataan, Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan, Anjab dan ABK Kab/Kota**
- d) Program Penataan Tatalaksana;**
- **Koordinasi, fasilitasi dan Pembinaan SOP Administrasi Pemerintahan**
  - **Peningkatan Kualitas Tatalaksana Pemerintahan**
  - **Pengembangan e-Government**
- e) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;**
- **Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tingkat Provinsi NTT**
  - **Pelaksanaan Analisis Beban Kerja pada SKPD Tingkat Provinsi**
  - **Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat**
  - **Penyelenggaraan Diklat Aparatur Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur**
  - **Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Lingkup Provinsi NTT**
  - **Pembentukan Assessment Centre dan Lembaga Sertifikasi Profesi Cabang Provinsi NTT**
  - **Pendidikan Penjurangan dan Peningkatan Kompetensi PNS**
  - **Seleksi Penerimaan CPNS, Calon IPDN serta PNS Tubel/Ibel**
  - **Penataan Sistem Administrasi dan Informasi Kepegawaian Daerah**
  - **Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS**
  - **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Kinerja PNS**
  - **Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah**
- f) Program Penguatan Pengawasan;**
- **Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**
  - **Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja**
  - **Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif**
  - **Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala**
  - **Monitoring dan evaluasi dan pelaporan terpadu**
  - **Pengawasan pelaksanaan dana BOS**
  - **Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
  - **Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah**
  - **Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah**
  - **Penanganan Kasus-Kasus Pada Wilayah Pemerintah Dibawahnya**
  - **Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan**

- g) **Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja;**
- **Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi SAKIP dan Budaya Kerja**
  - **Penyusunan LAKIP Gubernur NTT Tahun 2012, RKT dan PK SKPD Provinsi Tahun 2013**
  - **Penyusunan Indikator Kinerja Utam (IKU) Pemerintah Provinsi NTT dan IKU SKPD**
  - **Fasilitasi, Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Kinerja serta Penerapan Budaya Kerja**
  - **Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
  - **Evaluasi SAKIP**
  - **Pengendalian Budaya Kerja**
- h) **Program Penigkatan Kualitas Pelayanan Publik;**
- **Penyusunan dan Bimtek SPP dan SOP Pelayanan Publik**
  - **Penilaian Kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik Tingkat Nasional**
  - **Lokakarya Indeks Pengaduan Masyarakat**
  - **Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
  - **Pembinaan dan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik**
  - **Lokakarya Analisis Penyebab Pengaduan Masyarakat dan Rencana Tindak Nyata**
  - **Penilaian Kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik**
  - **Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik**
- i) **Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.**
- **Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Dalam satu kegiatan yang sama dengan kegiatan No.4 pada Program Penguatan Pengawasan Akuntabilitas)**

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
FRANS LEBU RAYA

No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Tertindakannya PMPRB dan Pelaporan secara on line	1 Dok				1 Dok		1 Dok		1 Dok		

  
 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
 FRANS LEBU BARYA

LAMPIRAN 1 : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : 58/4 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 15 Desember 2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013-2017

Tabel 24. Agenda Kegiatan Reformasi Birokrasi dalam Kerangka Waktu

No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian											SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017			
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>A. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>														
1	Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Penerimaan Aparatur Negara	Tersedianya Dokumen RMRB Pemprov NTT	1 Pergub	197,185										Biro Organisasi
		Tersosialisasi dan terbinaanya 8 program PANG RB (8 Area Perubahan)	1 Kall (Provinsi dan 21 Kab/Kota)			1 Kall (Provinsi dan 22 Kab/Kota)	150,000							
2	Revisi Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi NTT 2013-2017	Tersedianya Dokumen RMRB Pemprov NTT yang telah direvisi	1 Pergub											Biro Organisasi
		Tertaksananya Bimtek PMPRB	1 Kall			100,000								
3	Fasilitasi, Pembinaan dan Pengendalian Implementasi Reformasi Birokrasi	Tertaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Reformasi Birokrasi	Provinsi dan 2 Kab/Kota											
		Tersosialisasi dan terbinaanya 8 program PANG RB (8 Area Perubahan)	1 Kall (Provinsi dan 2 Kab/Kota)			100,000	22 Kab/Kota	191,532	22 Kab/Kota	207,000	22 Kab/Kota	238,050		Biro Organisasi

No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian													SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017					
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Reformasi Birokrasi					13 Kab/Kota		Provinsi & 5 Kab/Kota		Provinsi dan 5 Kab / Kota		Biro Organisasi			
4	Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja (Dalam satu kegiatan yang sama dengan kegiatan No.1 pada Program Penguatan Akuntabilitas)	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Budaya Kerja	21 Kab/Kota		12 Kab/Kota								Biro Organisasi			
		Tersedianya Laporan Evaluasi Budaya Kerja Pemerintah Provinsi NTT	1 Dok		1 Dok											
5	Pengendalian Budaya Kerja	Tertaksananya Bimtek Peningkatan Budaya Kerja					50 SKPD Provinsi	117,478					Biro Organisasi			
		Tersedianya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja					1 Laporan									
		Tersedianya Laporan Evaluasi Perjalanan Dinas														
6	Pembinaan Rohani dan Ziarah ke Tanah Suci	Meningkatnya Iman dan Taqwa PNS Provinsi NTT	6,434 orang	150,000	6,434 org	150,000	1 Laporan	170,000	6,434 org	190,000	6,434 org	250,000	Sekretariat DP KORPRI Provinsi NTT			

Perkiraan Waktu Penyelesaian

No	Kegiatan	Indikator	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		SKPD Penanggung Jawab				
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
7	Natal, Halal Bihalal dan syukuran Tahun Baru bagi anggota KORPRI lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Meningkatnya Penghormatan dan toleransi sesama Anggota KORPRI Lingkup Pemerintah Provinsi NTT			1 Kall	130,000	1 Kall	130,000					Sekretariat DP KORPRI Provinsi NTT				
8	Pekan Olahraga Nasional KORPRI Tahun 2017	Jumlah atlet yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional							80 Orang	980,000			Sekretariat DP KORPRI Provinsi NTT				
9	Pekan Olahraga dan Seni Tk. Provinsi NTT	Jumlah atlet yang mengikuti Porsemi Tk. Provinsi NTT	1.610 org	615,000	-	-	1.610 org	380,000	-	-	1.610 org	700,000	Sekretariat DP KORPRI Provinsi NTT				
<b>B PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>																	
1	Legislasi Daerah	Tersedianya Produk Legislasi Daerah:	795,375	750,000	650,000	991,875	1,140,000	0	Biro Hukum	4 Ranperda				5 Ranperda			
										4 Ranperda				5 Ranperda			
										40 Pergub				40 Pergub			
										200 Keppub/Ingub				200 Keppub/Ingub			
										200 Keppub/Ingub				200 Keppub/Ingub			

Perkiraan Waktu Penyelesaian

No	Kegiatan	Indikator	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		SKPD Penanggung Jawab
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah Mou dan MOA	20 Dok		20 Dok		20 Dok		20 Dok		20 Dok		
		Jumlah Produk Hukum yang evaluasi/ Kaji Ulang	246 Prokum		246 Prokum		246 Prokum		246 Prokum		246 Prokum		
		Tersedianya SOP Penyusunan Prolegda Provinsi NTT			1 Pergub								
2	Rapat Koordinasi Bidang Hukum	Tertaksananya Rakor Bidang Hukum	4 kali (21 Kab./Kota)	300,000	4 kali (21 Kab./Kota)	100,000	4 kali (21 Kab./Kota)	85,000	4 kali (21 Kab./Kota)	132,250	4 kali (21 Kab./Kota)	152,000	Biro Hukum
3	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab./Kota	Tertaksananya Pembinaan Ranperda	21 Kab./Kota	225,000	21 Kab./Kota	270,000	21 Kab./Kota	300,000	21 Kab./Kota	357,000	21 Kab./Kota	410,000	Biro Hukum
4	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi	21 Kab./Kota	108,250	21 Kab./Kota	120,000	21 Kab./Kota	100,000	21 Kab./Kota	158,700	21 Kab./kota	182,505	Biro Hukum
5	Penanganan Kasus didalam dan luar Pengadilan	Perkara di Pengadilan	5 Perkara	319,000	5 Perkara	350,000	5 Perkara	350,000	5 Perkara	462,000	5 Perkara	532,000	Biro Hukum
		Perkara di luar Pengadilan	5 Kasus		5 Kasus		5 Kasus		5 Kasus		5 Kasus		

No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian														SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017						
1	2	3	4 Target	5 Anggaran (000)	6 Target	7 Anggaran (000)	8 Target	9 Anggaran (000)	10 Target	11 Anggaran (000)	12 Target	13 Anggaran (000)	14				
6	Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Perundang-Undangan dan Inventarisasi masalah-masalah Hukum	Sosialisasi secara langsung  Sosialisasi secara tidak langsung	2 PerUjan Daerah  10 PerUjan Pusat, 10 PerUjan Daerah	199,000	2 PerUjan Daerah  10 PerUjan Pusat, 10 PerUjan Daerah	150,000	2 PerUjan Daerah  10 PerUjan Pusat, 10 PerUjan Daerah	120,000	2 PerUjan Daerah  10 PerUjan Pusat, 10 PerUjan Daerah	248,000	2 PerUjan Daerah  10 PerUjan Pusat, 10 PerUjan Daerah	280,000	Biro Hukum				
7	Pengembangan JDH tingkat Provinsi dan Pembinaan JDH Kab./Kota	Tertaksananya Rakor  Tertaksananya TOT	1 kali  1 kali	200,000	1 kali  1 kali	250,000	1 kali  1 kali	175,000	1 kali  1 kali	300,000	1 kali  1 kali	320,000	Biro Hukum				
8	LHKPN	Pejabat Eselon II  Koordinasi	Prov. Kab./Kota  Prov. Kab./Kota	300,000	Prov. Kab./Kota  Prov. Kab./Kota	250,000	Prov. Kab./Kota  Prov. Kab./Kota	175,000	Prov. Kab./Kota  Prov. Kab./Kota	330,000	Prov. Kab./Kota  Prov. Kab./Kota	360,000	Biro Hukum				
9	Koordinasi pelaksanaan RANHAM dan perumusan kebijakan Hukum.	Rakor Sadar Hukum	1 kali	362,000	1 kali	325,000	1 kali	165,000	1 kali	420,000	1 kali	460,000	Biro Hukum				

No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian														SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017						
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Pembinaan RANHAM	6 kali		7 kali		6 kali		5 kali		5 kali						
10	Koordinasi pelaksanaan RANHAM dan perumusan kebijakan Hukum.	Rakor Sadar Hukum	1 kali	362,000	1 kali	325,000	1 kali	165,000	1 kali	420,000	1 kali	460,000	Biro Hukum				
		Pembinaan RANHAM	6 kali		7 kali		6 kali		5 kali		5 kali						
C	<b>PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>																
1	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTT	Terdentuknya OPD Provinsi yang sesuai Peraturan Perundang-Undangan (yang tepat fungsi dan tepat ukuran)	Dinas, Badan, Biro, Setwan	340,392	UPT Dinas/ Badan Lingkup Pemprov (1 Dok)	300,000	5 Perda/ Pergub	653,670	5 Perda/ Pergub	750,000	5 Perda/ Pergub	850,000	Biro Organisasi				
		Tersusunnya Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Pemprov NTT					1 Pergub				6 Pergub		Biro Organisasi				
2	Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Provinsi NTT	Tersusunnya Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Pemprov NTT	46 SKPD (1 Pergub)	169,984	UPT Dinas/ Badan Lingkup Pemprov (1 Pergub)	170,000							Biro Organisasi				

No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian														SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017						
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Teraksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu Bidang Organisasi	21 kab/kota	100,000	21 Kab/kota	100,000								Biro Organisasi			
4	Rapat Koordinasi Bidang Organisasi	Teraksananya kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota			1 Dok (Prov dan 22 Kab/kota)	144,862								Biro Organisasi			
5	Penataan, Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan, Anjab dan ABK Kab/Kota	Teraksananya Fasiltasi Penataan, Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan, Anjab dan ABK Kab/kota			21 Kab/kota	200,000	22 Kab/kota	482,866	22 Kab/kota	550,000	22 Kab/kota						
		Teraksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu Bidang Organisasi					22 Kab/kota		22 Kab/kota								
		Tersedianya Software Sistem Pengembangan Database Provinsi dan Kab/Kota					1 paket										
		Teraksananya Rapat koordinasi Bidang Organisasi							1 Dok (Prov dan 22 Kab/kota)								

No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017				
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
D	PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA													Biro Organisasi	
1	Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan SOP Administrasi Pemerintahan	Memengkatnya Pemahaman Aparatur tentang Penyusunan SOP-AP	SKPD Provinsi	162,076										Biro Organisasi	
		Tersedianya Pergub SOP-AP di lingkungan Pemprov NTT	3 Pergub												
2	Peningkatan Kualitas Tataaksana Pemerintahan	Terlaksananya Bimtek SOP					1 kali	225,843						Biro Organisasi	
		Terlaksananya Validasi dan Pendampingan Penyusunan SOP			10 Biro	50,000	9 SKPD		20 SKPD	287,500	20 SKPD				
		Tersedianya Pergub SOP			1 pergub		1 Pergub		1 Pergub		1 Pergub				
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan SOP			5 Kab/Kota	50,000	Pemprov & 22 Kab/Kota		Pemprov & 22 Kab/Kota		Pemprov & 22 Kab/Kota				
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan SPM													
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan 5 Hari Kerja													
		Tersedianya Pergub tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja							1 Pergub						

Perkiraan Waktu Penyelesaian

No	Kegiatan	Indikator	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		SKPD Peninggung Jawab
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Tersedianya Pergub Tata Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah							1 Pergub		1 Pergub		
3	Pengembangan e-Government	Tersedianya Dokumen Master Plan e-Government Tersedianya Jaringan Internet Tersedianya website SKPD Tersedianya Aplikasi e-Office / e-Government							1 dok	400,000		2,501,350	Dinas Kominfo / Kantor PDE
											1 paket (50 SKPD)		Dinas Kominfo / Kantor PDE
											25 SKPD		Dinas Kominfo / Kantor PDE
											10 unit		Dinas Kominfo / Kantor PDE
E	<b>PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SOM APARATUR</b>												
1	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tingkat Provinsi NTT	Tersedianya Data Jabatan dan Informasi Jabatan Tersedianya Data dan Informasi tentang Kebutuhan PNS sesuai syarat jabatan	1 Dok	104,584									Biro Organisasi
2	Pelaksanaan Analisis Beban Kerja pada SKPD Tingkat Provinsi	Tersedianya informasi mengenai efisiensi beban/ volume kerja SKPD	1 Dok 46 SKPD (1 Dok)	163,492	UPT Dinas/ Badan Lingkup Pemprov (1 Dok)	150,000	1 Dok (50 SKPD)	336,517	1 Dok (50 SKPD)	350,000	1 Dok (50 SKPD)	350,000	Biro Organisasi

No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian														SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		14				
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Tersedianya Dokumen Peta Jabatan, Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan					1 Dok (50 SKPD)		1 Dok (50 SKPD)		1 Dok (50 SKPD)						
		Tersedianya tenaga penyusun evaluasi jabatan			1 Dok		50 Orang (50 SKPD)		50 Orang (50 SKPD)		50 Orang (50 SKPD)						
		Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan / Standar Kompetensi Manajerial															
3	Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat	Tersedianya AKD Tingkat SKPD Pemprov. NTT						50,000	1 Dokumen	500,000		1,000,000	0	Badan Diklat Prov. NTT			
		Tersedianya AKD Tingkat Perorangan dari Masing-masing SKPD dengan Taknis Intuitif					1 Dokumen										
		Tersedianya AKD Tingkat Kabupaten / Kota se- NTT									1 Dokumen						
		Tersedianya AKD tingkat SKPD dari Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT															
4	Penyelenggaraan Diklat Aparatur Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jenis Diklat Aparatur Alumni Diklat Aparatur Diklat Berdasarkan TNA	12 Diklat	3,600,000	11 Diklat	4,420,400	8 Diklat	3,410,000	13 Diklat	5,500,000	14 Diklat	6,000,000	0	Badan Diklat Prov. NTT			
			316 Orang		400 Orang		250 Orang		450 Orang	0	500 Orang						
									70%		80%						

No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian														SKPD Peneranggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017						
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Diklat dengan kurikulum berbasis kompetensi							30%		50%						
5	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Lingkup Provinsi NTT	Tersedianya standar kompetensi jabatan eselon IV, III dan II lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	1 Dok	100,000	-	-	1 Keg	125,000	1 Dok	150,000	1 Dok	200,000		Badan Kepegawaian Daerah			
6	Pembentukan Assessment Centre dan Lembaga Sertifikasi Profesi Cabang Provinsi NTT.	Tersedianya lembaga AC dan Sertifikasi Profesi.	-	-	1 Unit	125,000	3 paket	150,000	-	-	-	-		Badan Kepegawaian Daerah			
7	Pendidikan Penjurangan dan Peningkatan Kompetensi PNS	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional.	-	-	50 Org	128,000	120 Org	240,000	300 Org	550,000	300 Org	605,000		Badan Kepegawaian Daerah			
8	Seleksi Penerimaan CPNS, Calon IPDN serta PNS Tubel/lbel	Terwujudnya ketersediaan dan penempatan sumber daya aparatur sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi serta terwujudnya profesionalisme aparatur.	-	-	144 CPNSD, 65 Praja IPDN, 17 Tubel,	1,425,971	150 CPNSD, 72 Praja IPDN, 18 Tubel,	3,584,971	150 CPNSD, 72 Praja IPDN, 18 Tubel,	3,943,461	150 CPNSD, 72 Praja IPDN, 18 Tubel,	4,337,814		Badan Kepegawaian Daerah			

No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian														SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017						
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
9	Penataan Sistem Administrasi dan Informasi Kepegawaian Daerah	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan karir PNS lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Kab/Kota yang menjadi kewenangan Gubernur.	Provinsi dan 22 Kab/Kota	399,770	Provinsi dan 22 Kab/Kota	631,358	Provinsi dan 22 Kab/Kota	1,128,555	Provinsi dan 22 Kab/Kota	1,241,410	Provinsi dan 22 Kab/Kota	1,365,555	Badan Kepegawaian Daerah				
		Pelaksanaan Bimtek Penilaian Prestasi Kerja (PPK).	-	-	80 Org	189,160	60 Org	88,354	-	-	-	-					
		Proses penyelesaian administrasi kenaikan pangkat dan penempatan PNS di Provinsi dan 22 Kab/Kota.	KP : 3000 Org, Pindah/ Pensiun : 881 Org.	655,808	KP : 3000 Org, Pindah/ Pensiun : 250 Org.	623,252	KP : 3000 Org, Pindah/ Pensiun : 250 Org.	700,903	KP : 3000 Org, Pindah/ Pensiun : 250 Org.	770,993	KP : 3000 Org, Pindah/ Pensiun : 250 Org.	848,092					
		Penataan Sistem Informasi Kepegawaian	6434 Org	399,770	6490 Org	414,160	6712 Org	313,072	6,934 Org	344,379	7156 Org	378,817					
		Penyelesaian KARIS/KARSU PNS Provinsi NTT.	300 Org	26,064	250 Org	26,500	200 Org	28,000	200 Org	30,800	200 Org	33,880					
		Pemberian Penghargaan bagi PNS Provinsi NTT.	250 Org	179,452	300 Org	248,286	300 Org	315,790	300 Org	347,369	300 Org	382,105					
10	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS.	Terwujudnya pembinaan PNS dan penanganan pelanggaran disiplin PNS.	Sidak 3 Kali, 25 Kasus	195,722	Sidak 4 Kali, 25 Kasus	237,794	Sidak 4 Kali, 25 Kasus	354,608	Sidak 4 Kali, 25 Kasus	390,068	Sidak 4 Kali, 25 Kasus	429,075	Badan Kepegawaian Daerah				

No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian											SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		14	
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu.	Meningkatnya motivasi dan kinerja PNS.	Rakor : 1 Keg. Monev Kinerja 22 Kab/Kota, Monev Tubel/Ibel 15 Provinsi.	290,596	Rakor : 1 Keg. Monev Kinerja 22 Kab/Kota, Monev Tubel/Ibel 15 Provinsi.	526,940	Rakor : 1 Keg. Monev Kinerja 22 Kab/Kota, Monev Tubel/Ibel 15 Provinsi.	710,648	Rakor : 1 Keg. Monev Kinerja 22 Kab/Kota, Monev Tubel/Ibel 15 Provinsi.	781,000	Rakor : 1 Keg. Monev Kinerja 22 Kab/Kota, Monev Tubel/Ibel 15 Provinsi.	859,000	Badan Kepegawaia n Daerah	
12	Ujian Dinas dan Kenalkan Pangkat Penyesuaian Ijazah.	Terwujudnya ujian dinas dan penyesuaian ijazah di Provinsi dan Kab/Kota.	2 paket	199,000	2 paket	199,000	2 paket	199,000	2 paket	218,900	2 paket	240,790	Badan Kepegawaia n Daerah	

No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		14		
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>F PROGRAM Penguatan Pengawasan</b>															
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya Diklat Pembentukan JF Auditor / JF Pengawas Pemerintah												Inspektorat	
2	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Diklat/Bimtek Pengawas	13 orang	290,818	3 orang	107,380	1 orang	114,704						Inspektorat	
3	Kordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya Kordinasi pengusunan Pengangkatan JF Auditor dan JF Pengawas Pemerintahan					3 orang	47,315	3 orang	52,047	30 orang	57,252		Inspektorat	
							1 kegiatan	29,220	1 kegiatan	32,142					



No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian														SKPD Peranggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017						
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dengan Inspektoral Lenderal Kementerian	1 kegiatan	86,284	1 kegiatan	35,072	1 kegiatan	35,072	1 kegiatan	42,437	1 kegiatan	46,681					
		Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah	1 kali	6016,5	1 kali	109,021	1 kali	12,302	1 kali	131,915	1 kali	145,106					
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional	1 kali	74,836	1 kali	43,580	1 kali	4,192	1 kali	52,732	1 kali	58,005					
		Terlaksananya Koordinasi penyusunan PKPT / Pra Rakorwasdanas	1 kali	53,740	1 kali	43,580	1 kali	40,334	1 kali	52,732	1 kali	58,005					
4	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Terlaksananya Pemeriksaan Kinerja Pemprov NTT	47 SKPD	413,042	47 SKPD	301,340	25 SKPD	340,520	43 SKPD	2,128,583	43 SKPD	2,341,442	Inspektoral				
		Terlaksananya Pemeriksaan Kinerja Pemprov	84 SKPD	1,365,984	84 SKPD	1,422,415	84 SKPD	1,614,938	43 SKPD	1,721,122	43 SKPD	1,893,234					
		Terlaksananya Pemeriksaan Kinerja Inspektoral Kabupaten/Kota	21 SKPD	346,878	21 SKPD	391,738,200	22 SKPD	563,036	21 SKPD	474,003	21 SKPD	521,404					
		Terlaksananya Pemeriksaan Fisik	20 Kab/Kota	626,236	20 Kab/Kota	767,126	20 Kab/Kota	832,474	20 Kab/Kota	928,223	20 Kab/Kota	1,021,045					

No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian										SKPD Penanggung Jawab	
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017			
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Tertindakannya Pemeriksaan Desa Mandiri Anggur Merah	21 Kab/Kota	819,554	21 Kab/Kota	1,734,217				22 Kab/Kota	2,098,403	22 Kab/Kota	2,308,243	
		Monev pengelolaan keuangan SKPD Pemprov	49 SKPD		49 SKPD		49 SKPD	252,000	49 SKPD	260,150	49 SKPD	49 SKPD	286,165	
		Tertindakannya Evaluasi LAKIP SKPD Pemprov NTT	45 SKPD	42,500	45 SKPD	87,500	45 SKPD	105,000	49 SKPD	105,875	49 SKPD	49 SKPD	116462,5	
		Tertindakannya Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota			3 Kab/Kota	26,032	3 SKPD	2,869,600	12 SKPD	138,000	22 SKPD	275,000		
		Tertindakannya Evaluasi Program Desa Mandiri Anggur Merah TA. 2011-2013			21 Kab/Kota	2,021,688								
		Verifikasi dana Bansos Provinsi	1 paket	88,895,100	1 paket									
		Tertindakannya Evaluasi pencapaian SPM dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKP, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD)												
		Tertindakannya Evaluasi penerapan NSPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								43 entis	1,935,076	43 entis	1,935,076	



No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian														SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		14				
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Inspektorat			
7	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	21 Kab/Kota	240,446	21 Kab/Kota	197,808											
8	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Pemeriksaan Khusus/ Kasus lingkup Pemprov NTT				374,751								Inspektorat			
9	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	11 Kab/Kota	1,563,556	1 kab/Kota	96,571								Inspektorat			
10	Penanganan Kasus- Kasus Pada Wilayah Pemerintah Dibawahnya	Pemeriksaan Khusus/Kasus di wilayah Provinsi NTT							3 kasus	136,790	3 kasus	150,403		Inspektorat			
11	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Pemprov NTT	2 kali	104,694	2 kali	91,148			12 kali	24,200	12 kali	26,620		Inspektorat			
			Rapat Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan di Kabupaten/kota														
		Rapat Pra Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian	1 kali	47,890	1 kali	49,500	1 kali	27,884	1 kali	61,546	1 kali	67,701					



No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian														SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		14				
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
3	Penyusunan Indikator Kinerja Utam (IKU) Pemerintah Provinsi NTT dan IKU SKPD	Tersusunnya IKU Provinsi			1 Dok	100,000								Biro Organisasi			
4	Fasilitasi, Perbaikan dan Monitoring Evaluasi Kinerja serta Penerapan Budaya Kerja	Tersedianya Laporan Pembinaan dan Fasilitasi SAKIP dan Tersedianya Data Informasi SAKIP			2 Laporan	119,526								Biro Organisasi			
															1 paket (12 kab/kota)		
5	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersedianya Biretek SAKIP/ Terhathnya tenaga penyusun LAKIP, PK, RKT dan IKU SKPD			80 Orang (Provinsi & kab/kota)	100,000									Biro Organisasi		
																Tersedianya Data Monev SAKIP	
																Tersedianya Software Aplikasi SAKIP	
																Tersedianya Monev e-SAKIP	
																Tersedianya Evaluasi SAKIP	
																Tersedianya Biretek Pengembangan Budaya Kerja	
																Tersedianya Evaluasi Budaya Kerja	
6	Evaluasi SAKIP	Tersedianya Evaluasi SAKIP	46 SKPD Provinsi		50 SKPD Provinsi				50 SKPD Provinsi					Inspektorat			
7	Pengendalian Budaya Kerja	Tersedianya Biretek Pengembangan Budaya Kerja						117,478						Biro Organisasi			
															50 SKPD (50 SKPD)	50 SKPD (1 Laporan)	50 SKPD (1 Laporan)

No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian														SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		14				
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas Tersusunnya Pergub tunjangan kinerja Terlaksananya pembinaan dan monev Budaya Kerja Tersusunnya Pakta Integritas					50 SKPD (1 Laporan)		50 SKPD (1 Laporan) 1 Pergub		50 SKPD (1 Laporan)						
									22 Kab/Kota		22 Kab/Kota						
									50 SKPD (1 Dok)		50 SKPD (1 Dok)						
H	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>																
1	Penyusunan dan Bimtek SPP dan SOP Pelayanan Publik	Terlatihnya Aparatur Pemerintah yang memiliki kemampuan menyusun SPP	SKPD Provinsi (50 Orang)	72,684	UKPP Lingkupr ovinsi	50,000								Biro Organisasi			
2	Penilaian Kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik Tingkat Nasional	Kab/Kota yang diusulkan sebagai peserta CBAAN Nominatif UKPP Penerima Penghargaan Abdi Bakti Tani	1 Kab/Kota	89,053										Biro Organisasi			
3	Lokakarya Indeks Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Survey IPM dan Rencana Tindak Nyata	3 UKRP	99,884										Biro Organisasi			
4	Survey IKM	Terlaksananya Survey IKM	13 kab/kota	174,131	8 kab/kota	92,590								Biro Organisasi			
5	Pembinaan dan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Terfasilitasinya Penyusunan SSP di SKPD Provinsi dean Kab/Kota	6 kab/kota dan 2 SKPD Provinsi	72,000										Biro Organisasi			

No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017				
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelayanan Publik			46 SKPD Provinsi										
		Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			UKPP Provinsi dan 6 Kab/Kota										
6	Lokakarya Analisis Penyebab Pengaduan Masyarakat dan Rencana Tindak Nyata	Terlaksananya Lokakarya Pengelolaan Pengaduan, Survey IPM, Lokakarya Analisis Masalah Pengaduan dan Rencana Tindak Nyata			2 UKPP Provinsi (2 Dok)	107.410								Biro Organisasi	
7	Penilaian Kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik	Terlaksananya Sosialisasi Inovasi pelayanan publik Tersedianya Data Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Bimtek Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			1 kali (50 Orang/(50 SKPD))	158.167			6 UKPP Provinsi dan 8 UKPP Kab/Kota					Biro Organisasi	
		Kab/Kota yang diusulkan sebagai peserta CBAN							1 Kab/Kota						
		Nominatif UKPP							3 UKPP						
		Penerima Penghargaan Abdi Bakti Tani													
8	Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pemahaman Aparatur dalam Penyusunan SPP			50 Orang (50 SKPD)	111.814				200.000			250.000	Biro Organisasi	

No	Kegiatan	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017				
			Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)	Target	Anggaran (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Tertaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik  Tertaksananya Bimtek Fasilitas Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  Tertaksananya Manajemen Pengelolaan Pengaduan Masyarakat secara online  Revisi Pergub tentang Pelayanan Publik  Tersusunnya Pergub tentang SPP Provinsi  Tertaksananya Bimtek Inovasi Pelayanan Publik									1 paket				
1	PROGRAM MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN														
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Dalam satu kegiatan yang sama dengan kegiatan No.4 pada Program Penguatan PengawasanAkuntabilitas)	Tertaksananya Monitoring terpadu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT  Tertaksananya Rakor Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 kali (SKPD terkait 8 Area Perubahan RB)	75,000		1 kali (SKPD terkait 8 Area Perubahan RB)	85,000	1 kali (SKPD terkait 8 Area Perubahan RB)	100,000	Inspektorat, Biro Organisasi dan Tim RB Prov NTT		

38 TAHUN 2014  
15 DES 2014



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-824966 Kupang

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang.  
Dari : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang.  
Tanggal : 12 Januari 2015.  
Nomor : Hk.03.7/11/2015.  
Hal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2013 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017.

Sesuai Nota Dinas dari Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BO.065/143/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, Hal Mohon Koreksi, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak Naskah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2013 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017.

Dapat dijelaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2013 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018, maka program dan kegiatan serta agenda kegiatan Reformasi Birokrasi dalam kerangka waktu perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan itu maka dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Naskah Peraturan Gubernur dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas perkenan Bapak kami haturkan limpah terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M  
  
✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M. SI**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19570606 198610 1 003

TELAH DITELITI OLEH BIRO HUKUM	
TGL. 12. JAN. 2015	PARAF
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111  
Telepon (0380) 30382, 832697, 831234, Psw.143, 131, 137, 126, 135  
Fax. (0380)833624 Website : [pemprovntt.go.id](http://pemprovntt.go.id)

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.  
Dari : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.  
Tanggal : 30 Desember 2014  
Nomor : BO.065/143/XII/2014  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) exemplar  
Hal : Penyampaian Konsep Rancangan (Revisi) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2017.

---

Bersama ini disampaikan Rancangan (Revisi) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2017 untuk dikoreksi.

Demikian untuk maklum, dan atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA BIRO ORGANISASI  
KABAG KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK, 

  
**Drs. ADRIANUS RESI, M.Si**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196106021994031004

Ma 081 22736002